

BAB II

SEJARAH KONFLIK ROHINGYA

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah dari konflik Rohingya sehingga etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh untuk mencari perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan juga etnis Rakhine, dimana bentuk-bentuk diskriminasi yang diterima oleh etnis Rohingya seperti pemerkosaan, pembakaran pemukiman, pengusiran, bahkan pembunuhan. Akan tetapi, dikarenakan oleh banyaknya jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh, hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah Bangladesh. Dimana pemerintah Bangladesh mulai kesulitan dalam mengatasi permasalahan krisis pengungsi Rohingya ini, sehingga pemerintah Bangladesh memutuskan untuk menolak etnis Rohingya yang ingin mengungsi ke Bangladesh pada tahun 2016. Analisis di dalam bab ini dibagi kedalam tiga bagian, bagian pertama adalah sejarah konflik Rohingya di Myanmar, bagian kedua adalah sejarah pengungsi Rohingya di Bangladesh, dan bagian ketiga adalah penolakan pemerintah Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya.

A. Sejarah Konflik Rohingya di Myanmar

Etnis Rohingya merupakan penduduk minoritas beragama Islam yang bertempat tinggal di daerah Myanmar tepatnya Provinsi Arakan di sisi sebelah barat laut Myanmar berbatasan dengan Bangladesh, dan sekarang dikenal dengan provinsi Rakhine atau Rakhaing. Diperkirakan bahwa etnis Rohingya adalah keturunan campuran (Arab, Moor, Turki, Persia, Mogul dan Pathan), Bengali lokal dan Rakhine. Mereka berbicara versi Chittagonian, dialek regional Bengali yang juga digunakan secara luas di seluruh bagian tenggara Bangladesh (UNHCR, 2011, p. 7).

Setelah kemerdekaan Myanmar, yaitu pada masa kepemimpinan Jenderal Aung San, etnis Rohingnya menjadi salah satu etnis yang memiliki peranan dalam pemerintahan

Myanmar. Bahkan ada warga Rohingnya yang menjadi menteri di pemerintahan Myanmar pada tahun 1940-1950. Namun, pada tahun 1962 ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga pada akhirnya Ne Win berhasil menjadi Presiden di Myanmar, sistem politik Myanmar berubah menjadi lebih otoriter. Konflik yang kerap muncul di Myanmar yang melibatkan antar etnis terjadi dalam kurun 1991 sampai sekarang. Banyak faktor yang menjadi pemicu awal dari konflik yang berkepanjangan ini, mulai dari kasus pemerkosaan, diskrimasi warga minoritas dan masalah entitas etnis. Perlakuan diskriminatif terhadap Etnis Rohingnya, antara lain disebabkan oleh status mereka yang berbeda (Triono, 2014, pp. 2-6). Salah satu akar konflik tersebut adalah status etnis Rohingnya yang masih dianggap imigran ilegal di Myanmar. Pemerintah Myanmar juga tidak mengakui serta tidak memberi status kewarganegaraan kepada mereka. Sebagai akibat karena tidak memiliki kewarganegaraan, etnis Rohingnya tidak bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan bahkan pekerjaan yang layak (Waluyo, 2013, p. 838).

Pemerintah Myanmar tak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingnya karena menganggap kelompok Muslim ini bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Hal itu ditegaskan kembali oleh Presiden Myanmar, Thein Sein pada tahun 2012, dimana Myanmar tidak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingnya yang dianggap imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh. Sejak UU Kewarganegaraan 1982 diberlakukan di Myanmar, etnis yang diakui sebagai warga negara adalah etnis yang telah lama berada di Myanmar sebelum pendudukan kolonial Inggris tahun 1824. Tercatat ada 135 etnis namun warga Rohingnya etnis Bengali tidak termasuk didalamnya. Bukan hanya dilatar belakangi heterogenitas etnis saja yang menyebabkan konflik antar etnis melainkan juga disebabkan oleh adanya ketimpangan ekonomi, agama, superioritas etnis, dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terutama kebijakan yang mengandung unsur-unsur etnisitas

(memberikan hak *privilege* pada etnis tertentu) (Revolusi, 2013, p. 2).

Penyebab konflik yang lainnya ialah adanya kecemburuan dari etnis Rakhine terhadap etnis Rohingya. Hal tersebut dikarenakan populasi etnis Muslim Rohingya dalam beberapa tahun terus meningkat. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya dianggap sebagai sesuatu yang terus mengganggu. Keberadaan etnis Rohingya dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim Rohingya (Waluyo, 2013, p. 839). Keberadaan etnis Rohingya di Provinsi Rakhine semakin terancam oleh tindakan yang sewenang-wenang seperti penjarahan, pemusnahan tempat tinggal, pembakaran masjid dan pemerkosaan. Etnis Rohingya yang banyak menjadi korban perampasan tanah melampiaskan kekecewaannya pada etnis Rakhine yang jauh lebih dilindungi oleh pemerintah. Sejak saat itu, tingkat kebencian warga Muslim Rohingya semakin besar dengan etnis Rakhine dan konflik antar keduanya sering menimbulkan kerusakan dan pertikaian yang berlarut-larut di Provinsi Rakhine (Revolusi, 2013, p. 3).

Pada masa Rejim Militer, mulai dari era Ne Win hingga tahun 2000, etnis Rohingnya menghadapi situasi yang berat. Situasi ini dikarenakan adanya diskriminasi dalam skala besar yang dilakukan oleh pemerintah Junta Militer Myanmar (Triono, 2014, p. 2). Salah satunya adalah semakin gencarnya kebijakan Burmanisasi yang dilakukan dengan menerapkan program *model village* yaitu suatu perumahan yang dibangun khusus untuk orang-orang beragama Buddha seperti Buddha Rakhine dan orang Buddha lainnya yang sebagian besar berasal dari etnis Burma, mereka didatangkan secara massal dan kemudian dibekali kebutuhan hidup berupa pasokan bahan pangan dan diberikan rumah yang layak huni oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar bahkan menyita tanah warga Rohingya secara paksa untuk membangun *model village* ini, mereka kemudian menempatkan etnis Rakhine dan orang-orang

Buddha di daerah-daerah mayoritas Muslim Rohingya. Pemerintah Myanmar juga menggantikan tempat-tempat suci Rohingya dengan monumen bersejarah dan peninggalan Buddha berupa biara, pagoda Buddha dan asrama untuk biksu-biksu Rakhine. Etnis Rakhine direlokasi ke daerah-daerah *model village* yang merupakan daerah hasil rampasan tanah milik etnis Rohingya. Sebanyak 50 desa dengan 200 keluarga Rakhine tinggal di desa tersebut. Sementara itu, Muslim Rohingya yang kehilangan tanah mereka menjadi tunawisma tanpa mata pencaharian. Dalam pengembangan wilayah perbatasan khususnya di Provinsi Rakhine, junta militer telah memberikan masing-masing tanah Rohingya untuk budidaya pertanian dan peternakan kepada etnis Rakhine (Revolusi, 2013, p. 4).

Konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dan Rakhine yang pada awalnya belum banyak diketahui oleh dunia luar kemudian mencuat pada bulan Juni-Agustus tahun 2012, dimana pemberitaan media internasional mulai memberitakan fakta-fakta tentang adanya konflik Rohingnya. Hal tersebut memancing kemarahan dari etnis Rakhine yang kemudian berakhir pada konflik yang tidak berhenti. Konflik ini memuncak pada juli 2012. Puncak dari konflik ini ditandai dengan adanya pembakaran besar-besaran terhadap perumahan yang dihuni oleh etnis Rohingnya serta penyerangan yang dilakukan oleh kedua belah etnis. Bahkan tentara dan polisi Myanmar diduga ikut memprovokasi kedua etnis dan turut menyerang perkampungan Rohingnya. Banyak pihak yang mengancam konflik tersebut, hal ini dikarenakan Myanmar pada saat itu sedang mengalami proses demokrasi. Salah satu pihak yang mengancam konflik tersebut adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa, namun tidak menyalahkan pemerintahan Myanmar sebagai penyebab dari konflik tersebut. Lembaga lain seperti Amnesty Internasional dan Organisasi HAM (Hak Asasi Manusia) dunia menilai bahwa pemerintah Myanmar telah melakukan diskriminasi secara sistematis

terhadap etnis Rohingnya yang telah menyebabkan penderitaan etnis Rohingnya yang tak kunjung usai (Triono, 2014, p. 3).

B. Sejarah Pengungsi Rohingnya di Bangladesh

Banyak etnis minoritas yang seringkali menjadi korban, karena dianggap tidak loyal dan ingin memisahkan diri dari Myanmar, yang salah satunya adalah etnis Rohingnya. Etnis Rohingnya dianggap oleh rejim Ne Win sebagai sebuah ancaman, sehingga dilancarkanlah sebuah operasi untuk menumpas pergerakan separatis dan mengontrol penduduk etnis Rohingnya pada tahun 1978, yang pada akhirnya upaya ini mengakibatkan etnis Rohingnya mengungsi dari Myanmar ke wilayah Bangladesh (Triono, 2014, p. 2). Bangladesh sendiri adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di Barat, Myanmar di tenggara serta Teluk Bangla di Selatan dan Bangladesh merupakan negara miskin yang padat penduduk. Bangladesh memiliki jumlah penduduk terbesar kedelapan di dunia dan merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, dimana ada sekitar 163 juta jiwa jumlah penduduk pada tahun 2016 di negara yang luas wilayahnya hanya 147.570 km² (Statistics, 2006).

Etnis Rohingnya yang bermigrasi ke Bangladesh pada umumnya merupakan korban kekerasan, okupasi militer dan pembersihan etnis yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Karena Bangladesh merupakan negara tetangga yang letaknya paling berdekatan dengan Myanmar, maka tidak mengherankan jika banyak etnis Rohingnya yang mencari perlindungan ke Bangladesh. Selain itu faktor kesamaan etnis dan agama pun dirasa oleh Rohingnya mampu memberi rasa aman bagi mereka. Pada awalnya Bangladesh menyambut baik kedatangan Rohingnya dan pemerintah Bangladesh berharap untuk dapat mengatasi persoalan ini melalui diplomasi dengan pemerintah Myanmar (Adelia, 2013).

Bahkan pada tahun 1978, pemerintah junta militer Myanmar melakukan operasi Naga Min atau sensus penduduk.

Sekitar 200.000 orang melarikan diri ke Bangladesh untuk mencari perlindungan. Tidak berhenti sampai disitu, pemerintahan Jenderal Ne Win kemudian memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar di tahun 1982. Undang-Undang ini dirancang dengan meniadakan nama Rohingya dari 135 etnis yang diakui di Myanmar, dengan itu maka undang-undang ini telah menghapus hak-hak dasar bagi rakyat Rohingya sebagai manusia (Yasyid, 2017, p. 1289). Jumlah aliran migrasi paksa yang lebih besar, yakni sekitar 250.000 orang, terjadi di tahun 1992 saat pemerintah Myanmar tidak henti-hentinya melakukan tindak represi kepada Rohingya. Pemerintah Bangladesh menyediakan sekitar 20 kamp pengungsian di distrik Cox's Bazar bagi orang-orang Rohingya yang datang (Kigaru, 2011).

Bertujuan untuk menghindari tekanan dan kesulitan di Myanmar, orang-orang Rohingya yang datang ke Bangladesh pun harus menghadapi berbagai kesulitan di negara tujuan. Secara umum, orang-orang yang bermigrasi paksa kerap menempati wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, tingkat pembangunan rendah dengan kapasitas lokal yang terbatas, serta tingkat sosial ekonomi yang buruk. Permasalahan yang seringkali muncul di wilayah kamp pengungsian adalah buruknya sumber daya primer, seperti tempat tinggal, ketersediaan air, sanitasi, dan makanan. Menanggapi hal ini pemerintah Bangladesh kemudian membenahi kualitas tempat tinggal di tempat pengungsian pada tahun 2006 meskipun belum dapat dikatakan sebagai tempat tinggal yang layak huni (Wardhani 2012, 9).

Pemerintah Bangladesh yang pada awalnya menerima kehadiran dari etnis Rohingya dengan tangan terbuka mulai kesulitan untuk menangani banyaknya jumlah pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah Bangladesh dan Bangladesh sendiri juga berharap agar dapat mengakhiri permasalahan ini melalui diplomasi dengan pemerintah Myanmar. Bangladesh sendiri bukanlah negara yang ikut meratifikasi *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* (Konvensi Tentang

Kedudukan Pengungsi Tahun 1951) atau *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967* (Protokol Tentang Kedudukan Pengungsi tahun 1967), akan tetapi pemerintah Bangladesh hanya melaksanakan tanggung jawab moralnya, sehingga meskipun mereka sebenarnya tidak mengharapkan kedatangan Rohingya yang terus menerus memasuki Bangladesh, bantuan dari berbagai organisasi internasional seperti *Medecins Sans Frontiere*, *British Muslim Aid*, *World Food Programme*, dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) disambut baik dengan harapan permasalahan ini dapat segera terselesaikan.

Kesepakatan untuk melaksanakan program repatriasi kemudian tercapai antara Menteri Luar Negeri Bangladesh dan Myanmar. Program repatriasi pun mulai dijalankan pada awal bulan September 1992. Namun, program repatriasi ini tidak berjalan dengan lancar karena sekembalinya para pengungsi ke Myanmar, dalam waktu yang tidak lama mereka kembali mengungsi ke Bangladesh dengan sebab yang sama, yaitu penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Bukatutup program repatriasi kemudian terjadi sejak September 1992 dan berakhir pada Juli 2005 karena Myanmar yang menolak untuk melanjutkan program repatriasi dan terus menolak warga Rohingya yang akan dipulangkan, sehingga pengungsi Rohingya yang masih berada di Bangladesh menolak untuk di repatriasi dan sebagian dari mereka yang telah pulang ke Myanmar kembali melarikan diri ke Bangladesh.

Krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh meningkatnya kekerasan di Negara Bagian Rakhine Myanmar menyebabkan penderitaan yang sangat besar. Kekerasan ekstrem dan diskriminasi telah menyebabkan lebih dari 727.000 pengungsi Rohingya memutuskan untuk menyeberangi perbatasan ke Cox's Bazar, Bangladesh. Bahkan sejak 25 Agustus 2017 menjadikan ini krisis pengungsi yang tumbuh paling cepat di dunia, konsentrasi pengungsi di Cox's Bazar termasuk yang terpadat di dunia. Pengungsi yang tiba di Bangladesh sebagian besar adalah wanita dan anak-anak yang mengalami trauma,

dan beberapa yang tiba di Bangladesh mendapatkan luka-luka yang disebabkan oleh tembakan, pecahan peluru, ranjau dsb (OCHA, 2018).

Tabel 2.1 Penyebaran Pengungsi Rohingya di Bangladesh

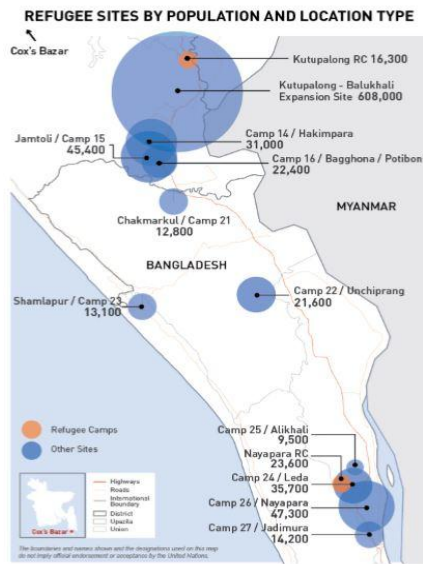
Rohingya refugees reported by location as of 24 May 2018

Location	Total Population
Refugees in Camps and Settlements	
Kutupalong Expansion Site ¹	607,096
Kutupalong RC	16,248
Camp 14, 15, 16	98,493
Camp 21 (Chakmarkul)	12,802
Camp 22 (Unchiprang)	21,560
Camp 23 (Shamlapur)	13,106
Camp 24 (Leda)	35,686
Camp 25 (Ali Khali)	9,543
Camp 26 (Nayapara)	47,295
Camp 27 (Jedimura)	14,229
Nayapara RC	23,543
Sub Total	899,601
Refugees in Host Communities	
Cox's Bazar Sadar and Ramu	7,025
Teknaf	5,052
Ukhia	3,000
Sub Total	15,077
TOTAL Rohingya	914,678

Sumber: (ISCG, 2018)

Pada tahun 2018, jumlah pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh semakin meningkat, yaitu ada sekitar 899.601 pengungsi yang ada di kamp-kamp pengungsian yang disediakan oleh pemerintah Bangladesh yang tersebar di berbagai wilayah dan ada sekitar 15.077 etnis Rohingya yang ada diluar kamp pengungsian (ISCG, 2018).

Gambar 2.1 Peta Penyebaran Pengungsi Rohingya di Bangladesh



Sumber: (ISCG, 2018)

Adanya penolakan pemerintah Myanmar terhadap status kewarganegaraan etnis Rohingya mengakibatkan pengungsi Rohingya tidak memiliki kartu identitas. Hal ini menyulitkan pendataan pengungsi di Bangladesh. Permasalahan kartu identitas ini menjadikan pengungsi Rohingya hanya dapat diberikan status sebagai pengungsi dan tidak dapat diubah menjadi pekerja imigran, sehingga pengungsi Rohingya hanya dapat menggantungkan hidupnya pada bantuan kemanusiaan dan tidak diperbolehkan untuk mencari pekerjaan di Bangladesh. Hal ini membuat mereka hidup dalam situasi yang serba kekurangan dan dibatasi ruang geraknya. Sementara bantuan di kamp pengungsian tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka. Dengan terpaksa mereka keluar dari kamp pengungsian dengan membayar sejumlah uang atau

memberikan barang kepada pihak otoritas kamp (disebut *majee*, pihak yang ditugaskan untuk mengawasi pengungsi Rohingya).

Hal ini tidak mudah dilakukan karena keterbatasan materi yang mereka miliki, dengan uang yang dihasilkan dari bekerja secara ilegal di luar kamp pengungsian yang mana penghasilan tersebut belum tentu cukup untuk digunakan bagi memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari, mereka juga harus membayar kepada *majee*. Meskipun dibatasi pergerakannya dan tidak memiliki ijin untuk bekerja, namun diketahui banyak dari orang-orang Rohingya yang tetap mencari pekerjaan di luar area kamp pengungsian. Tingkat pekerjaan yang rendah di wilayah Cox's Bazar tidak menghalangi keinginan orang-orang Rohingya untuk bekerja walaupun dengan upah yang sangat rendah. Menurut Jannat, anggota the British Commission, orang-orang Rohingya merasa lebih mudah untuk mencari pekerjaan di Bangladesh dibandingkan di Myanmar (Danish Immigration Service, 2011, p. 13).

Tercatat bahwa upah yang diterima oleh para pekerja Rohingya adalah sebesar 180-250 Taka per hari (1 Taka = Rp. 120). Jumlah ini merupakan sebagian dari upah yang diterima oleh pekerja lokal Bangladesh, yakni sebesar 300 Taka per hari. Bagi para pemilik perusahaan, tentu keberadaan orang-orang Rohingya yang ingin bekerja ini jelas menguntungkan karena mampu meminimalisasi biaya produksi. Akan tetapi hal ini kemudian memunculkan persaingan antara masyarakat lokal dengan orang-orang Rohingya dalam mendapatkan pekerjaan (Adelia, 2013, p. 10).

Aktivitas yang dilakukan oleh sebagian pengungsi Rohingya ini sendiri berdampak terhadap keamanan nasional Bangladesh, dimana aktivitas ini sebagian besar terjadi di wilayah perbatasan negara Bangladesh. Aktivitas pengungsi Rohingya tersebut dilakukan secara tersembunyi dan mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi ekstrimis seperti penjualan dan pendistribusian senjata, narkoba, dsb sehingga wilayah perbatasan rentan terhadap konflik. Sementara itu, internal Bangladesh pun rentan terancam keamanannya akibat

persaingan tenaga kerja antara penduduk lokal dan pengungsi dari Rohingya, serta wilayah kamp pengungsian yang padat penduduk sehingga rentan terjadi gesekan dan memicu keributan. Akibat dari aktivitas-aktivitas di perbatasan tersebut, mengingat seringnya terjadi sengketa di wilayah perbatasan Bangladesh dan Myanmar, permasalahan Rohingya ini secara tidak langsung telah membuat situasi bagi Bangladesh dan Myanmar kian memburuk. Meskipun perselisihan kedua negara belum mengarah pada perang terbuka, namun bentrokan-bentrokan yang terjadi di perbatasan sudah sering terjadi. Hal ini dikarenakan sikap defensif masing-masing negara atas aktivitas ilegal yang dilakukan oleh sekelompok orang dan melibatkan pengungsi Rohingya didalamnya. Alih-alih melakukan kerjasama untuk menghentikan kejahatan di perbatasan, Bangladesh dan Myanmar lebih memilih untuk mengamankan perbatasan kedua negara dengan caranya masing-masing (Yasyid, 2017, pp. 1294-1295).

Selain itu, krisis pengungsi Rohingya ini juga memberikan dampak bagi perekonomian Bangladesh. Menurut Kementerian Keuangan Bangladesh, pendapatan Pemerintah pada tahun 2017 adalah 28,64 miliar USD dalam mata uang saat ini dan nilai tukar saat ini. Sedangkan perkiraan bantuan yang diperlukan untuk menyediakan para pengungsi Rohingya sebesar 1 milyar USD per tahun, yang jumlahnya sekitar 3,5% dari pendapatan Pemerintah pada tahun 2017. Ini merupakan jumlah yang cukup besar untuk membiayai pengungsi dan hal ini menjadikan beban yang besar bagi suatu negara. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan Bangladesh, Abul Maal Abdul Muhith, karena ia mengatakan bahwa krisis Rohingya memberi tekanan besar pada ekonomi negara Bangladesh. Oleh sebab itu, pemerintah Bangladesh sendiri masih bergantung kepada komunitas internasional termasuk negara-negara yang sering membantu untuk membiayai pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh (László, 2018, pp. 28-30).

C. Penolakan Bangladesh terhadap Pengungsi Rohingya

Penolakan Bangladesh terhadap kaum Rohingya di perbatasan merupakan akibat dari perubahan persepsi dari negara Bangladesh dalam memandang isu migrasi internasional. Dimana pada awalnya kehadiran dari etnis Rohingya dipandang sebagai sebuah isu kemanusiaan dimana Rohingya merupakan korban dari kebijakan pemerintah Myanmar. Sehingga pemerintah Bangladesh berpendapat bahwa etnis Rohingya membutuhkan bantuan kemanusiaan. Namun seiring berjalannya waktu, aliran migrasi etnis Rohingya yang memasuki wilayah perbatasan Bangladesh semakin meningkat. Perubahan persepsi Bangladesh sendiri disebabkan oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang didasari oleh kehadiran etnis Rohingya yang tiada henti untuk memasuki wilayah Bangladesh yang kemudian mampu menjadikan isu migrasi internasional bertransformasi menjadi isu keamanan manusia dan keamanan nasional Bangladesh.

Perekonomian Bangladesh yang buruk, kelangkaan sumber daya, dan tingkat pengangguran yang tinggi di wilayah Cox's Bazar diiringi dengan bertambahnya kehadiran dari etnis Rohingya mengakibatkan persaingan dalam memenuhi kebutuhan dasar meningkat antara masyarakat lokal dengan pengungsi Rohingya. Persaingan ini kemudian berdampak pada dilakukannya tindak kekerasan dari masyarakat lokal kepada etnis Rohingya (Adelia, 2013, pp. 12-13).

Terlebih ketika konflik Arakan yang terjadi pada Juni 2012, dimana aliran migrasi dari Myanmar ke Bangladesh semakin sering berdatangan. Arus migrasi tersebut mampu membawa konflik ke dalam negara penerima. Hal ini terbukti dengan adanya konflik berbasis agama yang terjadi di Bangladesh pada September 2012. Ketidakstabilan ekonomi dan sosial oleh Rohingya pada akhirnya mengancam keamanan dari masyarakat Bangladesh sendiri. Pemerintah Bangladesh kemudian secara resmi mulai menolak masuknya etnis Rohingya ke Bangladesh pada tahun 2012, bahkan pemerintah Bangladesh membentuk satuan polisi perbatasan dengan

kebijakan “*push back*” yaitu suatu kebijakan untuk menolak mengizinkan Rohingya yang ingin melarikan diri untuk masuk ke Bangladesh, dan mendorong mereka untuk kembali ke Myanmar (Yasyid, 2017, p. 1297).

Keberadaan etnis Rohingya yang telah lama menetap kemudian menimbulkan situasi tidak kondusif bagi stabilitas keamanan Bangladesh, oleh sebab itu persepsi Bangladesh berubah seiring berjalannya waktu. Rohingya yang semula dipandang sebagai korban kemanusiaan, kemudian menjadi sumber dari penyebab ancaman keamanan manusia bagi masyarakat Bangladesh yang berdampak pada pecahnya konflik agama. Hal ini kemudian tidak lagi dipandang oleh Bangladesh hanya merupakan masalah keamanan manusia biasa, tetapi menjadi ancaman bagi keamanan nasional Bangladesh. Ancaman yang dapat mempengaruhi sektor ekonomi, sosial, dan politik Bangladesh menjadi motif utama penolakan keras dan pengetatan akses masuk Rohingya dan bantuan internasional di tahun 2010-2012 (Adelia, 2013, p. 13).

Kemudian, pasca kekerasan yang terjadi di Myanmar pada 25 Agustus 2017, Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Çavuşoğlu meminta Bangladesh untuk kembali menerima Muslim Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar barat. Kerusuhan yang terjadi di negara bagian Rakhine Myanmar pada 25 Agustus dikarenakan oleh pasukan keamanan Myanmar yang melancarkan operasi terhadap etnis Rohingya. Hal ini memicu masuknya pengungsi baru ke negara tetangga Bangladesh, meskipun negara itu menutup perbatasannya bagi para pengungsi (TRT, 2017). Banyaknya jumlah pengungsi Rohingya yang ingin memasuki Bangladesh menyebabkan pemerintah Bangladesh kembali menerima kedatangan tiba-tiba ratusan ribu pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari pembersihan etnis di Myanmar. Ini menyusul gelombang kekerasan sebelumnya pada Oktober 2016, yang memaksa sekitar 93 ribu etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Tabel 2.2 Pertumbuhan Pengungsi Rohingya pada Tahun 2016-2017

Arrival period	Number of persons	% of total
Before 9 Oct 2016	72,821	8%
Between 9 Oct 2016 and 24 Aug 2017	93,645	11%
Between 25 Aug 2017 and 31 Dec 2017	712,179	80%

Sumber: (UNHCR, 2018)

Penghormatan Bangladesh terhadap prinsip *non-refoulement* terutama patut dipuji pada saat banyak negara lain membangun tembok, mendorong pencari suaka kembali ke perbatasan, dan mendeportasi orang tanpa mempertimbangkan klaim perlindungan mereka secara memadai. Saat ini, lebih dari 900.000 pengungsi Rohingya berada di area Cox's Bazar di ujung selatan Bangladesh. Ini terdiri dari hampir 700.000 pendatang baru di atas lebih dari 200.000 pengungsi Rohingya yang sudah tinggal di daerah itu, setelah melarikan diri dari gelombang penganiayaan dan penindasan di Myanmar sebelumnya (HRW, 2018, p. 1).

Jadi dapat disimpulkan bahwa etnis Rohingya merupakan salah satu kelompok etnis yang mendapatkan perlakuan diskriminasi dari negara asalnya, Myanmar. Yang mana pemerintahan junta militer Myanmar yang telah berkuasa sejak tahun 1962 memang dikenal sebagai rezim yang paling represif di dunia (Freedom House, 2003). Melalui tindakan diskriminasi, kekerasan, dan pengusiran oleh pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya bertujuan untuk pembersihan etnis Rohingya yang ada di Arakan, Myanmar. Tindak kekerasan melalui lembaga negara bukanlah sebuah hal baru bagi negara-negara tertentu untuk mengurangi jumlah populasi mereka (Wardhani, 2012).

Tindakan dari Myanmar terhadap etnis Rohingya pada akhirnya memunculkan migrasi paksa. Hal ini di karenakan oleh tekanan-tekanan yang mereka terima, etnis Rohingya kemudian memilih untuk mencari perlindungan ke negara tetangga, terutama Bangladesh (Adelia, 2013, p. 2). Etnis

Rohingya yang bermigrasi ke Bangladesh pada umumnya merupakan korban kekerasan, okupasi militer dan pembersihan etnis yang berlangsung secara sistematis oleh pemerintah Myanmar (International Federation of Human Rights Leagues, 2000).

Karena Bangladesh merupakan negara tetangga yang letaknya paling berdekatan dengan Myanmar, maka tidak heran apabila banyak etnis Rohingya yang memilih untuk mencari perlindungan ke Bangladesh. Selain itu faktor kesamaan etnis dan agama pun dirasa mampu memberikan rasa aman bagi mereka. Pada awalnya Bangladesh menyambut baik kedatangan Rohingya dan pemerintah Bangladesh berharap untuk dapat mengatasi persoalan ini melalui diplomasi dengan pemerintah Myanmar. Akan tetapi seiring berjalannya waktu jumlah pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh semakin meningkat, dan pemerintah Bangladesh semakin kesulitan untuk menangani pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh yang berujung pada penolakan Bangladesh terhadap etnis Rohingya pada tahun 2016 (Adelia, 2013, p. 2). Namun pada tahun 2017, Bangladesh kembali menerima pengungsi Rohingingya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya desakan Turki kepada Bangladesh untuk kembali menerima pengungsi Rohingya (TRT, 2017) dan banyaknya jumlah pengungsi Rohingya yang ingin memasuki wilayah Bangladesh pada Agustus 2017, yang mana hal ini dikarenakan konflik yang kembali terjadi di Myanmar pada tahun 2016.

